



Ujaran Satir atau Penghinaan? Analisis Linguistik Forensik terhadap Frasa “Prabodoh Subiantotol” dalam Diskursus Politik Indonesia

J. Anhar Rabi Hamsah Tis’ah^{1*}, Andri Purwanto², Yakobus M. Langkelang Niron³

¹Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Aryasatya Deo Muri, Indonesia

Email: anhar.rabi@umj.ac.id¹, andri.purwanto@unindra.ac.id², yakobusniron8@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: anhar.rabi@umj.ac.id

Abstract. *This study analyzes the linguistic construction, semantic meaning, pragmatic function, and forensic implications of the phrase “Prabodoh Subiantotol” in Indonesian political discourse. The issue is important because digital political speech often blurs the boundary between democratic criticism, political satire, and insult. This study uses a descriptive qualitative method with a forensic linguistics perspective. Data were collected from audiovisual documentation, online news reports, and public digital responses that discussed the phrase. The analysis focuses on lexical modification, evaluative meaning, speech act function, implied meaning, communicative context, and possible social-legal interpretation. The findings show that the phrase is formed through name modification and wordplay by inserting negative lexical elements into a personal name. Semantically, the elements “bodoh” and “tolol” create a derogatory evaluation. Pragmatically, the utterance functions as political criticism, yet it also targets personal identity. The study concludes that the phrase occupies a grey area between political satire and insult. The study contributes a contextual model for assessing controversial digital utterances.*

Keywords: *Digital Public Sphere; Forensic Linguistics; Insult; Political Satire; Speech Acts.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konstruksi linguistik, makna semantik, fungsi pragmatik, dan implikasi forensik frasa “Prabodoh Subiantotol” dalam diskursus politik Indonesia. Isu ini penting karena ujaran politik digital sering memunculkan perdebatan antara kritik demokratis, satire politik, dan penghinaan, terutama ketika bahasa menyasar tokoh publik serta beredar luas melalui media daring. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan perspektif linguistik forensik. Data diperoleh dari dokumentasi audiovisual, pemberitaan daring, dan respons publik digital yang membahas frasa tersebut. Analisis diarahkan pada modifikasi leksikal, makna evaluatif, tindak tutur, makna tersirat, konteks komunikatif, serta kemungkinan tafsir sosial-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa tersebut dibentuk melalui modifikasi nama diri dan permainan bahasa dengan menyisipkan unsur leksikal bernilai negatif. Secara semantik, unsur “bodoh” dan “tolol” membangun evaluasi merendahkan. Secara pragmatik, ujaran tersebut berfungsi sebagai kritik politik, tetapi tetap mengarah pada identitas personal. Dengan demikian, frasa tersebut berada pada wilayah batas antara satire politik dan penghinaan. Penelitian ini memberi kontribusi berupa model analisis kontekstual untuk menilai ujaran digital yang kontroversial secara lebih objektif, proporsional, dan berbasis bukti kebahasaan.

Kata kunci: Kebebasan Berekspresi; Linguistik Forensik; Penghinaan; Ruang Publik Digital; Satire Politik.

1. LATAR BELAKANG

Bahasa dalam ruang publik digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa juga membentuk opini, menggerakkan dukungan, dan memicu konflik ketika pesan politik memakai ekspresi yang menyerang pihak tertentu. Castaño-Pulgarín et al. (2021) menunjukkan bahwa ujaran kebencian daring perlu dipahami melalui hubungan antara bahasa, platform, dan perilaku sosial pengguna. Fonseca et al. (2024) juga menegaskan bahwa pola interaksi pengguna dapat memperluas dampak ujaran kontroversial di media sosial. Kondisi tersebut membuat linguistik forensik semakin relevan dalam kajian bahasa Indonesia

kontemporer. Hidayat (2022) menempatkan analisis linguistik forensik sebagai perangkat penting untuk menilai unsur pidana pada ujaran kebencian di media sosial. Mubarak et al. (2024) menemukan bahwa komentar kasar di media sosial Indonesia dapat memuat pola linguistik yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Putra et al. (2024) menambahkan bahwa identifikasi ujaran kebencian harus memperhatikan bentuk ujaran, sasaran, dan konteks komunikasi.

Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah penggunaan frasa “Prabodoh Subiantotol” dalam diskursus politik Indonesia. Frasa tersebut memodifikasi nama diri dengan menyisipkan unsur “bodoh” dan “tolol”, sehingga menghasilkan bentuk baru yang bernilai evaluatif negatif. As Shofi & Hadiutomo (2025) menunjukkan bahwa istilah seperti “bodoh”, “tolol”, dan “goblok” dalam media daring Indonesia sering bergantung pada relasi sosial, peran penutur, dan tujuan komunikatif. Karena itu, frasa tersebut tidak cukup dinilai melalui makna kamus saja.

Perdebatan utama muncul pada batas antara satire politik dan penghinaan. Tis’ah (2024) menunjukkan bahwa kata bernilai negatif tidak selalu berfungsi sebagai penghinaan karena konteks pragmatik dapat mengubah arah makna. Fernando & Setiawan (2024) juga menjelaskan bahwa tindak tutur pencemaran nama baik di media sosial perlu dibaca melalui fungsi ujaran dan konteks penyampaiannya. Hadiwijaya et al. (2025) memperkuat pandangan tersebut dengan menekankan relasi antara kebebasan berekspresi dan risiko defamasi dalam ujaran kritis.

Penelitian terdahulu banyak membahas ujaran kebencian, komentar kasar, dan pencemaran nama baik di media sosial. Komara et al. (2025) mengkaji ujaran kebencian dalam komentar Instagram dengan menghubungkannya pada KUHP dan UU ITE. Ramli et al. (2024) menyoroti praktik kejahatan berbahasa dalam kolom komentar TikTok sebagai fenomena yang membutuhkan analisis forensik. Namun, kajian khusus tentang modifikasi nama tokoh politik sebagai bentuk satire atau penghinaan masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi linguistik, makna semantik, fungsi pragmatik, dan implikasi forensik frasa “Prabodoh Subiantotol”. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa penilaian terhadap ujaran politik digital harus berbasis data kebahasaan dan konteks komunikasi. Fokus tersebut penting agar perbedaan antara kritik, satire, dan penghinaan dapat dijelaskan secara sistematis, bukan hanya melalui kesan subjektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Linguistik Forensik dan Ujaran Digital

Linguistik forensik menghubungkan analisis bahasa dengan konteks hukum dan sosial. Wasi et al. (2024) menunjukkan bahwa penelitian linguistik forensik terus berkembang pada isu identifikasi penulis, ancaman, defamasi, dan ujaran digital. Asfar (2022) menempatkan ujaran kebencian sebagai salah satu objek penting karena bukti kebahasaan dapat menunjukkan bentuk, sasaran, dan dampak ujaran. Dalam konteks media sosial, objek linguistik tidak dapat dipisahkan dari respons publik yang terbentuk setelah ujaran beredar.

Kajian ujaran digital membutuhkan perhatian pada sasaran dan bentuk serangan. Ibrohim dan Budi (2023) menjelaskan bahwa deteksi bahasa abusif dalam media sosial Indonesia menghadapi tantangan karena variasi kosakata, konteks, dan ragam bahasa. Ghenai et al. (2025) juga menegaskan bahwa ujaran kebencian memiliki dampak emosional, linguistik, dan tematik terhadap pengguna media sosial. Oleh sebab itu, analisis forensik harus membaca teks sebagai tindakan sosial yang memproduksi konsekuensi.

Makna Evaluatif dan Potensi Penghinaan

Makna evaluatif muncul ketika pilihan kata memberi penilaian terhadap seseorang, kelompok, atau tindakan. As Shofi & Hadiutomo (2025) memperlihatkan bahwa kata bernilai hinaan dalam media daring Indonesia tidak selalu memiliki fungsi tunggal. Kata yang sama dapat menjadi umpatan, kritik, candaan, atau serangan personal sesuai medan komunikasi dan relasi penutur. Hal ini penting karena frasa yang dikaji dalam penelitian ini memakai unsur leksikal yang bernilai negatif.

Dalam kasus defamasi, analisis tidak cukup berhenti pada keberadaan kata kasar. Fernando dan Setiawan (2024) menekankan bahwa tindak tutur defamasi perlu dianalisis melalui bentuk ujaran, sasaran, dan efek reputasional. Tis'ah (2024) menunjukkan bahwa pemaknaan kata “goblok” dapat berubah ketika konteks pragmatik menunjukkan fungsi kritik, ekspresi emosional, atau penghinaan. Dengan demikian, makna evaluatif harus ditautkan dengan tujuan komunikasi.

Pragmatik, Tindak Tutur, dan Makna Tersirat

Pragmatik membantu menjelaskan fungsi ujaran dalam situasi komunikasi tertentu. Ria & Setiawan (2023) menunjukkan bahwa ujaran kebencian dalam komentar TikTok dapat dianalisis melalui tindakan lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nuraeni et al. (2022) juga menemukan bahwa ujaran kebencian di Instagram memuat strategi pragmatik yang berkaitan dengan maksud penutur dan respons pembaca. Analisis ini berguna untuk membedakan makna literal dan makna yang sebenarnya dibangun dalam konteks politik.

Makna tersirat penting dalam ujaran politik karena penutur sering menggunakan sindiran, ironi, dan permainan bahasa. Leicht (2023) menjelaskan bahwa parodi berita dan satire politik bekerja melalui peniruan, penyimpangan, dan kritik terhadap wacana dominan. Burgers & Brugman (2022) menunjukkan bahwa berita satiris dapat memengaruhi respons afektif, pembelajaran, dan persuasi *audiens*. Karena itu, satire tidak hanya dipahami sebagai humor, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi politik.

Satire Politik dan Kebebasan Berekspresi

Satire politik memiliki posisi penting dalam demokrasi karena membuka ruang kritik terhadap kekuasaan. Assagaf (2023) menegaskan bahwa humor daring di Indonesia sering menghadapi ketidakjelasan batas hukum ketika diposisikan sebagai kebebasan berekspresi atau penghinaan. Nave & Lane (2023) menunjukkan bahwa pengaturan ujaran daring memerlukan perhatian pada hak asasi manusia dan tanggung jawab platform. Dua temuan ini memperlihatkan bahwa penilaian ujaran kontroversial tidak boleh hanya bertumpu pada rasa tersinggung.

Namun, satire dapat bergeser menjadi penghinaan ketika serangan diarahkan pada identitas personal. Maarouf et al. (2024) menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial dapat menyebar luas ketika diproduksi oleh aktor yang memiliki visibilitas tinggi. Komara et al. (2025) menemukan bahwa komentar digital yang menyerang individu publik dapat memunculkan tafsir hukum jika memuat unsur kebencian atau penghinaan. Oleh karena itu, penelitian ini memakai kerangka analisis yang menilai bentuk bahasa, fungsi pragmatik, konteks, dan dampaknya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif linguistik forensik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan, fungsi, dan implikasi ujaran dalam konteks sosial-politik, bukan pada pengukuran statistik. Hadiwijaya et al. (2025) menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik terhadap ujaran kritis membutuhkan pembacaan kontekstual agar tidak mengaburkan perbedaan antara ekspresi politik dan defamasi. Wasi et al. (2024) juga menegaskan bahwa penelitian linguistik forensik dapat menggabungkan analisis linguistik dan konteks hukum secara interdisipliner. Data penelitian berupa frasa “Prabodoh Subiantotol” dan konteks tuturan yang menyertainya. Data dikumpulkan melalui dokumentasi audiovisual, pemberitaan daring, transkripsi tuturan, serta respons publik digital yang relevan dengan objek kajian. Pemilihan data dilakukan secara purposive karena hanya data yang memuat frasa, konteks produksi, dan respons sosial yang

digunakan. Data yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tidak dimasukkan dalam analisis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih data yang memuat bentuk frasa, konteks ujaran, dan respons terhadap ujaran. Pada tahap penyajian, data dikelompokkan dalam kategori konstruksi linguistik, makna semantik, fungsi pragmatik, dan implikasi forensik. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti membandingkan temuan pada setiap kategori agar hasil analisis tidak bertumpu pada satu indikator saja.

Kerangka operasional penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap dimensi analisis memiliki fokus, indikator, dan keluaran yang berbeda. Kerangka ini membantu menjaga analisis tetap sistematis karena ujaran yang mengandung unsur negatif tidak otomatis dikategorikan sebagai penghinaan.

Tabel 1. Kerangka Operasional Analisis Linguistik Forensik.

Dimensi Analisis	Fokus Analisis	Indikator Utama	Keluaran Analisis
Konstruksi linguistik	Bentuk modifikasi nama diri	Perubahan bentuk nama, penyisipan kata, dan permainan bahasa	Pola pembentukan frasa
Makna semantik	Makna leksikal dan evaluatif	Kata bernilai negatif, konotasi, dan arah penilaian	Status makna dasar frasa
Fungsi pragmatik	Maksud dan dampak ujaran	Lokusi, ilokusi, perlokusi, dan implikatur	Fungsi kritik atau serangan personal
Implikasi forensik	Kemungkinan tafsir sosial-hukum	Sasaran ujaran, konteks politik, dan respons publik	Posisi antara satire dan penghinaan

Tabel 1 memperlihatkan bahwa analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari bentuk bahasa hingga implikasi forensik. Susunan ini mencegah kesimpulan yang terlalu cepat karena setiap dimensi harus dibaca bersama dengan konteks dan dampak ujaran.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data audiovisual, berita daring, dan respons publik digital. Triangulasi teori dilakukan dengan mengaitkan temuan pada perspektif semantik, pragmatik, satire politik, dan linguistik forensik. Dengan langkah ini, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar analisis yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Linguistik Frasa “Prabodoh Subiantotol”

Frasa “Prabodoh Subiantotol” terbentuk melalui modifikasi nama diri. Unsur “Prabowo” dimodifikasi menjadi “Prabodoh”, sedangkan “Subianto” dimodifikasi menjadi “Subiantotol”. Perubahan tersebut bekerja melalui permainan bahasa karena nama asli tetap

dapat dikenali, tetapi diberi tambahan unsur yang menghasilkan makna merendahkan. Dalam kajian ujaran digital, bentuk seperti ini penting karena perubahan kecil pada bentuk kata dapat mengubah arah makna dan efek sosial.

Secara leksikal, “bodoh” dan “tolol” termasuk istilah yang membawa evaluasi negatif terhadap kemampuan intelektual. As Shofi & Hadiutomo (2025) menunjukkan bahwa istilah serupa dalam media daring Indonesia sering digunakan untuk menandai posisi sosial, relasi kuasa, dan sikap penutur. Dalam frasa yang dikaji, kedua unsur tersebut tidak berdiri sebagai umpatan umum, tetapi dilekatkan pada nama seseorang. Pelekatan ini membuat evaluasi negatif menjadi lebih personal dan mudah diasosiasikan dengan sasaran ujaran.

Makna Semantik dan Arah Evaluasi

Makna semantik frasa tersebut menunjukkan dua lapis penilaian. Lapis pertama muncul dari bentuk nama diri yang masih dapat dikenali oleh audiens. Lapis kedua muncul dari unsur “bodoh” dan “tolol” yang membawa konotasi merendahkan. Tis’ah (2024) menunjukkan bahwa kata bernilai negatif perlu dianalisis bersama tujuan komunikasi karena maknanya dapat bergerak antara ekspresi emosional, kritik, dan penghinaan.

Dari sisi arah evaluasi, frasa tersebut tidak hanya menilai tindakan atau kebijakan. Frasa tersebut mengalihkan penilaian menuju identitas personal karena kata negatif masuk ke dalam struktur nama. Fernando & Setiawan (2024) menekankan bahwa persoalan defamasi muncul ketika ujaran menimbulkan potensi kerusakan reputasi terhadap pihak yang disasar. Karena itu, aspek semantik dalam frasa ini memberi dasar awal untuk menilai adanya risiko penghinaan, meskipun belum menjadi kesimpulan final.

Fungsi Pragmatik dalam Konteks Kritik Politik

Analisis pragmatik menunjukkan bahwa frasa tersebut muncul dalam ruang kritik politik. Penutur menggunakan bentuk yang provokatif untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap isu publik dan menarik perhatian audiens. Ria & Setiawan (2023) menunjukkan bahwa tindak tutur di media sosial dapat memiliki fungsi ekspresif sekaligus memengaruhi respons pembaca. Dalam kasus ini, ilokusi utama tidak hanya berupa penyebutan nama, tetapi juga ekspresi penilaian politik.

Namun, fungsi kritik tidak menghapus potensi dampak penghinaan. Nuraeni et al. (2022) menemukan bahwa ujaran kebencian dalam komentar digital sering memperoleh makna dari hubungan antara bentuk ujaran, maksud penutur, dan respons pembaca. Hadiwijaya et al. (2025) juga menegaskan bahwa ujaran kritis dapat berada di antara kebebasan berekspresi dan defamasi ketika bentuk bahasanya menyerang reputasi. Oleh sebab itu, frasa ini perlu ditempatkan sebagai ujaran yang memiliki fungsi ganda.

Matriks Temuan Semantik-Pragmatik

Temuan utama penelitian diringkas dalam Tabel 2. Tabel tersebut menyajikan hubungan antara unit bahasa, makna semantik, fungsi pragmatik, dan implikasi forensik. Penyajian ini diperlukan agar pembahasan tidak hanya berhenti pada keberadaan kata kasar, tetapi juga melihat cara kata tersebut bekerja dalam konteks politik.

Tabel 2. Matriks Temuan Semantik-Pragmatik Frasa “Prabodoh Subiantotol”.

Unit Bahasa	Makna Semantik	Fungsi Pragmatik	Implikasi Forensik
“Prabodoh”	Nama diri yang dimodifikasi dengan unsur “bodoh”	Menandai evaluasi negatif terhadap sasaran politik	Berpotensi dianggap menyerang identitas personal
“Subiantotol”	Nama diri yang dimodifikasi dengan unsur “tolol”	Memperkuat efek sindiran dan ekspresi ketidakpuasan	Meningkatkan risiko tafsir penghinaan
Frasa lengkap	Gabungan wordplay dan evaluasi negatif	Berfungsi sebagai kritik politik yang provokatif	Berada pada wilayah batas antara satire dan penghinaan

Tabel 2 menunjukkan bahwa frasa yang dikaji memiliki dua arah makna yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, frasa tersebut memakai strategi satire dan permainan bahasa, tetapi di sisi lain frasa tersebut melekatkan evaluasi negatif pada identitas personal.

Satire Politik atau Penghinaan

Sebagai satire politik, frasa tersebut memiliki unsur permainan bahasa, kritik terhadap kekuasaan, dan efek provokasi. Burgers dan Brugman (2022) menunjukkan bahwa satire dapat memengaruhi respons afektif dan mendorong pembaca untuk menilai isu politik secara berbeda. Leicht (2023) juga menempatkan parodi dan satire sebagai bentuk komunikasi politik yang bekerja melalui peniruan dan penyimpangan. Berdasarkan dua indikator tersebut, frasa “Prabodoh Subiantotol” dapat dipahami sebagai strategi retorik untuk menyampaikan kritik.

Akan tetapi, frasa tersebut juga memiliki ciri penghinaan karena kritik tidak diarahkan secara langsung pada kebijakan, melainkan masuk ke dalam nama personal. Assagaf (2023) menunjukkan bahwa humor daring di Indonesia dapat masuk ke wilayah hukum ketika unsur humor dipahami sebagai penghinaan. Komara et al. (2025) menemukan bahwa ujaran digital terhadap tokoh publik perlu dianalisis melalui isi, sasaran, dan konteks publikasi. Dengan demikian, status frasa ini tidak dapat ditetapkan secara tunggal tanpa analisis kontekstual.

Implikasi Forensik dan Batas Penilaian

Implikasi forensik utama dari temuan ini adalah perlunya model penilaian yang menempatkan bentuk bahasa dan konteks secara seimbang. Putra et al. (2024) menunjukkan bahwa analisis ujaran kebencian terhadap lembaga publik memerlukan identifikasi sasaran dan jenis serangan. Nave & Lane (2023) menekankan bahwa penanganan ujaran daring perlu

menjaga keseimbangan antara perlindungan dari bahaya dan hak berekspresi. Dalam kasus ini, frasa tidak cukup disebut satire karena memuat serangan leksikal terhadap nama, tetapi juga tidak cukup disebut penghinaan tanpa melihat konteks kritik politik.

Temuan ini juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam membaca respons publik. Maarouf et al. (2024) menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat menyebar dan memperoleh daya virality melalui struktur media sosial. Ghenai et al. (2025) menambahkan bahwa ujaran semacam ini dapat membentuk dampak emosional dan tematik yang berbeda pada pengguna. Karena itu, dampak sosial perlu diperiksa sebagai bagian dari analisis, tetapi dampak tersebut tidak boleh menggantikan analisis linguistik terhadap bentuk dan fungsi ujaran.

Secara keseluruhan, frasa “Prabodoh Subiantotol” berada dalam area abu-abu antara satire politik dan penghinaan. Frasa tersebut memuat kreativitas linguistik yang lazim dalam kritik politik, tetapi juga menggunakan unsur yang dapat merendahkan identitas personal. Hasil ini sejalan dengan temuan Ramli et al. (2024) bahwa kejahatan berbahasa di ruang digital sering muncul dalam bentuk komentar yang tampak spontan, tetapi memiliki konsekuensi sosial. Hasil ini juga selaras dengan Ibrohim dan Budi (2023) yang menekankan pentingnya konteks dalam memahami bahasa abusif Indonesia di media sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa “Prabodoh Subiantotol” merupakan bentuk modifikasi nama diri yang dibangun melalui permainan bahasa. Unsur “bodoh” dan “tolol” memberi makna evaluatif negatif yang dapat dipahami sebagai bentuk perendahan. Namun, makna tersebut tidak dapat diputuskan hanya melalui analisis leksikal karena frasa muncul dalam konteks kritik politik dan ruang publik digital.

Secara pragmatik, frasa tersebut berfungsi sebagai ekspresi kritik yang provokatif. Ujaran tersebut menarik perhatian audiens dan membangun tekanan retorik terhadap objek politik yang disasar. Pada saat yang sama, penggunaan kata negatif di dalam nama personal membuat ujaran itu berisiko ditafsirkan sebagai penghinaan. Karena itu, frasa tersebut lebih tepat ditempatkan dalam wilayah batas antara satire politik dan penghinaan.

Penelitian ini menyarankan agar analisis ujaran politik digital dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk bahasa, konteks produksi, tujuan komunikatif, sasaran ujaran, dan dampak sosial. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada meme politik, komentar media sosial, dan parodi digital yang menggunakan modifikasi nama tokoh publik.

Kajian lanjutan juga perlu membangun instrumen analisis yang lebih terukur agar penilaian terhadap kritik, satire, dan penghinaan dapat dilakukan secara lebih konsisten.

DAFTAR REFERENSI

- As Shofi, S., & Hadiutomo, D. A. (2025). A sociolinguistic analysis of insulting language in Indonesian online media. *JL3T (Journal of Linguistics, Literature and Language Teaching)*, 11(2), 322–336. <https://doi.org/10.32505/jl3t.v11i2.11908>
- Asfar, N. A. (2022). A literature review of hate speech: Forensic linguistics study. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 3(2), 109–114. <https://doi.org/10.55637/ijfl.3.2.6333.109-114>
- Assagaf, A. S. A. (2023). Legal analysis of freedom of expression and online humour in Indonesia. *The European Journal of Humour Research*, 11(3), 105–122. <https://doi.org/10.7592/EJHR.2023.11.3.807>
- Burgers, C., & Brugman, B. (2022). How satirical news impacts affective responses, learning, and persuasion: A three-level random-effects meta-analysis. *Communication Research*, 49(7), 966–993. <https://doi.org/10.1177/00936502211032100>
- Castaño-Pulgarín, S. A., Suárez-Betancur, N., Tilano Vega, L. M., & Herrera López, H. M. (2021). Internet, social media and online hate speech: Systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 58, 101608. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101608>
- Fernando, E., & Setiawan, T. (2024). Forensic linguistics: Speech acts of defamation on social media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(12), 2543–2554. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i12.12601>
- Fonseca, A., Pontes, C., Moro, S., Batista, F., Ribeiro, R., Guerra, R., & Silva, C. (2024). Analyzing hate speech dynamics on Twitter/X: Insights from conversational data and the impact of user interaction patterns. *Heliyon*, 10(11), e32246. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32246>
- Ghenai, A., Noorian, Z., Moradisani, H., Abadeh, P., Erentzen, C., & Zarrinkalam, F. (2025). Exploring hate speech dynamics: The emotional, linguistic, and thematic impact on social media users. *Information Processing & Management*, 62(3), 104079. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2025.104079>
- Hadiwijaya, M., Sunuyeko, N., & Yahmun, Y. (2025). Forensic linguistic analysis of critical speech in the Haris Azhar & Fatia video: Between freedom of expression and defamation. *Journey: Journal of English Language and Pedagogy*, 8(1), 172–178. <https://doi.org/10.33503/journey.v8i1.1874>
- Hidayat, A. R. (2022). Penerapan analisis linguistik forensik dalam menentukan unsur pidana ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 241–262. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.241-262>
- Ibrohim, M. O., & Budi, I. (2023). Hate speech and abusive language detection in Indonesian social media: Progress and challenges. *Heliyon*, 9(8), e18647. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18647>
- Komara, A. B., Hasani, A., & Firmansyah, D. (2025). Analisis linguistik forensik terhadap ujaran kebencian netizen pada kolom komentar Instagram Kaesang Pangarep dan Erina

- Gudono tahun 2024. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 200–212. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.28328>
- Leicht, C. V. (2023). Nightly news or nightly jokes? News parody as a form of political communication: A review of the literature. *Political Studies Review*, 21(2), 390–399. <https://doi.org/10.1177/14789299221100339>
- Maarouf, A., Pröllochs, N., & Feuerriegel, S. (2024). The virality of hate speech on social media. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CSCW1), 1–22. <https://doi.org/10.1145/3641025>
- Mubarok, Y., Sudana, D., Yanti, D., Sugiyo, Aisyah, A. D., & Af'idah, A. N. (2024). Abusive comments (hate speech) on Indonesian social media: A forensic linguistics approach. *Theory and Practice in Language Studies*, 14(5), 1440–1449. <https://doi.org/10.17507/tpls.1405.16>
- Nave, E., & Lane, L. (2023). Countering online hate speech: How does human rights due diligence impact terms of service? *Computer Law & Security Review*, 51, 105884. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105884>
- Nuraeni, I., Harisanti, N. L. R., & Maksum, H. (2022). Tuturan kebencian dalam komentar warganet pada akun Instagram @obrolanpolitik: Kajian pragmatik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(1), 189–197. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i1.4198>
- Putra, V. G. R., Febriyatko, A., & Busri, H. (2024). Hate speech in Instagram comments of DPR RI: A forensic linguistic analysis. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 10(1), 173–196. <https://doi.org/10.22219/kembara.v10i1.28128>
- Ramli, R. B., Puspita, L. E., & Sauhenda, A. F. (2024). Language crime practices: Cyberbullying in the TikTok comment section (review): A forensic linguistics analysis. *Musamus Journal of Language and Literature*, 7(1), 288–295. <https://doi.org/10.35724/mujolali.v7i1.6241>
- Ria, R. N., & Setiawan, T. (2023). Forensic linguistic analysis of netizens' hate speech acts in Tik-Tok comment section. *Britain International of Linguistics Arts and Education (BIO LAE) Journal*, 5(2), 141–152. <https://doi.org/10.33258/biolae.v5i2.894>
- Tis'ah, J. A. R. H. (2024). Perspective of the word "goblok" uttered by unscrupulous preachers in terms of pragmatics: A forensic linguistic study. *Journal of Linguistica*, 1(4), 35–46. <https://doi.org/10.62872/jol.v1i4.89>
- Wasi, M., Zaki, S., & Anwar, R. H. (2024). A bibliometric analysis of research in forensic linguistics. *SAGE Open*, 14(4), 1–18. <https://doi.org/10.1177/21582440241299280>